Katalog: 4101002.8202

Indikator Kesejahteraan Rakyat

Kabupaten Halmahera Tengah 2017

Katalog: 4101002.8202

Indikator Kesejahteraan Rakyat

Kabupaten Halmahera Tengah 2017

ISBN : 978-602-662-130-6
No. Publikasi : 82020.1822
Katalog : 4102004.8202

Ukuran Buku : 14,8 cm x 21 cm
Jumlah Halaman : xiv + 34

Naskah :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah

Penyunting :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah

Desain Kover:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah

Ilustrasi Kover:
Ikon kesejahteraan rakyat

Diterbitkan Oleh :
©Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah

Dicetak oleh :
CV. Tara Taro

TIM PENYUSUN

Indikator Kesejahteraan Rakyat
Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017

Pengarah:
Iwan Fajar Prasetyawan, SST, M.Si

Penanggung Jawab Umum:
Iwan Fajar Prasetyawan, SST, M.Si

Penanggung Jawab Teknis:
Iwan Fajar Prasetyawan, SST, M.Si

Penyunting:
Ilham Sanjaya, SST

Penulis:
Harjuni Ariska, SST

Pengolah Data:
Harjuni Ariska, SST

Desain:
Harjuni Ariska, SST
Luthfan Eka Putra, SST

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Halmahera Tengah 2017 merupakan publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Halmahera Tengah. Publikasi ini berisi tentang data dan informasi terkait kesejahteraan rakyat. Publikasi ini diharapkan dapat membantu pengguna data dalam memahami keadaan dan perkembangan kesejahteraan rakyat khususnya Kabupaten Halmahera Tengah.

Publikasi ini hanya mencakup aspek-aspek yang dapat diukur dan tersedia datanya. Untuk memudahkan interpretasi, aspek-aspek yang dikaji hanya dibatasi pada aspek kependudukan, pendidikan, kesehatan dan gizi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, dan sosial lainnya.

Akhirnya, banyak pihak telah berkontribusi bagi terbitnya publikasi ini, untuk itu kami ucapkan terima kasih dan penghargaan atas bantuan dan kerjasamanya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Weda, Desember 2018

Kepala BPS

Kabupaten Halmahera Tengah

Iwan Fajar Prasetyawan, SST., M.Si.

DAFTAR ISI

halaman

DAFTAR TABEL

halaman

DAFTAR GAMBAR

halaman

SINGKATAN DAN AKRONIM

AKB	Angka Kematian Bayi
APK	Angka Partisipasi Kasar
APM	Angka Partisipasi Murni
APS	Angka Partisipasi Sekolah
ASI	Air Susu Ibu
BPS	Badan Pusat Statistik
D1/D2/D3	Diploma 1/Diploma 2/Diploma 3
L	Perempuan
L+P	Laki-laki + Perempuan
MI	Madrasah Ibtidaiyah
P	Perempuan
Puskesmas	Pusat Kesehatan Masyarakat
Pustu	Puskesmas Pembantu
PLN	Perusahaan Listrik Negara
Ruta	Rumah tangga
SD	Sekolah Dasar
SDM	Sumber Daya Manusia
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SP	Sensus Penduduk
SUPAS	Survei Penduduk Antar Sensus
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional
Wajar	Wajib Belajar

PENJELASAN UMUM

Tanda-tanda, satuan-satuan, dan lain-lainnya yang digunakan dalam publikasi ini adalah sebagai berikut:

1. TANDA-TANDA

Data tidak tersedia	:	...
Tidak ada atau nol	:	–
Data dapat diabaikan	:	0
Tanda decimal	:	,
Data tidak dapat ditampilkan	:	NA
Angka perkiraan	:	^{e}
Angka sementara	:	^{x}
Angka sangat sementara	:	^{xx}
Angka diperbaiki	:	^{r}

2. SATUAN

barel	: 158,99 liter = 1/6,2898 m^3
hektar (ha)	: 10 000 m^2
kilometer (km)	: 1 000 meter
knot	: 1,8523 km/jam
kuintal	: 100 kg
KWh	: 1 000 Watt *hour*
MWh	: 1 000 KWh
liter (untuk beras)	: 0,80 kg
ons	: 28,31 gram
ton	: 1 000 kg

Satuan lain: buah, dus, butir, helai/lembar, kaleng, batang, pulsa, ton kilometer (ton-km), jam, menit, persen (%). Perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh pembulatan angka.
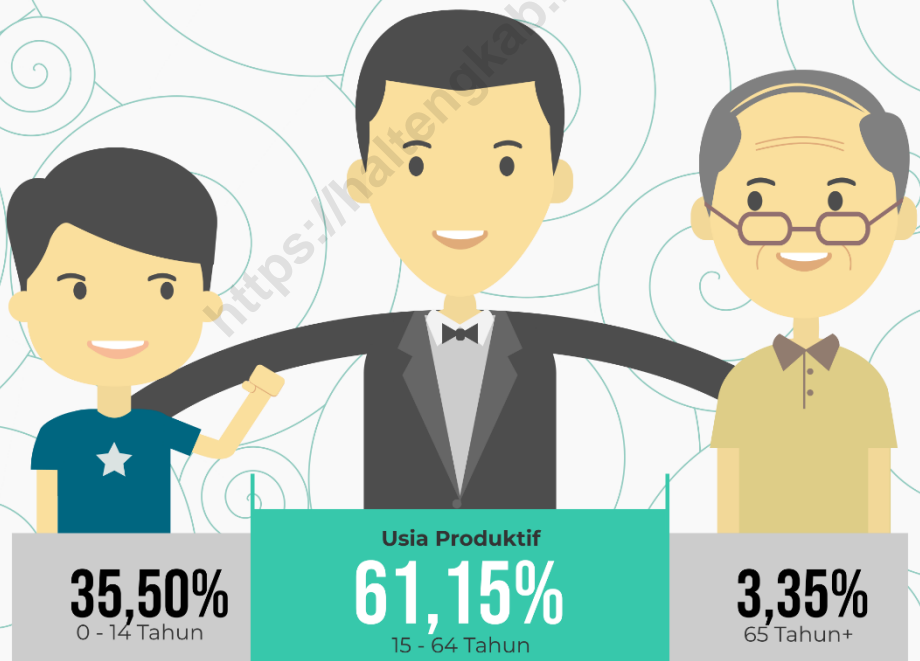
1
KEPENDUDUKAN
Usia Produktif
35,50%
0 - 14 Tahun
61,15%
15 - 64 Tahun
3,35%
65 Tahun+
66,71
ANGKA BEBAN
KETERGANTUNGAN
2017
Perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk 15-64 tahun (usia produktif).
Sumber: BPS,Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2017

KEPENDUDUKAN

Penduduk adalah aspek penting dalam proses pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi sebuah keuntungan namun dapat juga menjadi beban dalam proses pembangunan jika tidak memiliki kualitas yang baik. Oleh sebab itu, jika pemerintah ingin pembangunan berjalan dengan baik maka selain perlu upaya pengendalian jumlah penduduk, juga perlu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusianya.

Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Tabel 1. Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk

Kabupaten	Tahun		
	2010	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Halmahera Tengah	42 980	51 315	52 813
Laju Pertumbuhan Penduduk per tahun			
2010-2017		3,04	
2016-2017		2,92	

Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk Halmahera Tengah dari tahun 2010 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010, jumlah penduduk Halmahera Tengah mencapai 42.980 jiwa dan meningkat menjadi 51.315 jiwa pada tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2017 jumlah penduduk Halmahera Tengah meningkat menjadi 52.813 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk yang cukup tinggi ini dapat menimbulkan masalah kependudukan yang serius jika tidak dikendalikan. Oleh karena itu, upaya pengendalian pertumbuhan penduduk yang disertai dengan peningkatan kesejahteraan penduduk harus dilakukan secara berkesinambungan dengan program pembangunan.

Pada tabel 1, dapat diketahui rata-rata laju pertumbuhan penduduk Halmahera Tengah pada periode 2010 – 2017 mencapai 3,04 persen per

tahun. Sementara pada periode 2016 – 2017, laju pertumbuhannya sebesar 2,92 persen per tahun lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan per tahun pada periode 2010 – 2017. Hal ini berarti terjadi perlambatan pertumbuhan jumlah penduduk dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun, dengan nilai laju pertumbuhan penduduk tersebut pemerintah tidak boleh merasa puas tetapi harus terus meningkatkan program pengendalian penduduk. Program-program lainnya seperti penambahan berbagai fasilitas kesehatan dan pendidikan maupun pemenuhan kebutuhan pangan dan papan juga sangat penting untuk memberikan pelayanan prima bagi penduduk.

Komposisi dan Kepadatan Penduduk

Komposisi penduduk merupakan hal penting dalam pertimbangan pembangunan supaya pembangunan lebih tepat sasaran. Dalam pembangunan, perlu melihat suatu kelompok yang perlu diprioritaskan dibanding yang lain. Hal ini dikarenakan daerah memiliki komposisi penduduk yang berbeda.

Berdasarkan tabel 2 di bawah ini, Kabupaten Halmahera Tengah memiliki persentase penduduk usia 0 – 14 tahun yang cukup tinggi. Penduduk dengan rentang usia ini membutuhkan pendidikan dasar yang baik supaya dapat tercipta generasi atau SDM yang berkualitas. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempersiapkan fasilitas pendidikan yang lebih baik.

Penduduk dengan usia 20 – 49 tahun juga menunjukkan persentase yang cukup tinggi yaitu sekitar 42,02 persen. Usia ini merupakan usia subur bagi penduduk baik laki-laki maupun perempuan. Pemerintah juga perlu memperhatikan hal ini. Jika tidak, maka dapat terjadi pertumbuhan penduduk yang tinggi pada tahun-tahun berikutnya.

Tabel 2. Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur (5 Tahunan) dan Jenis Kelamin, 2017

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
0 - 4	13,68	13,05	26,74
5 - 9	12,36	12,73	12,54
10 - 14	11,17	10,83	11,00
15 - 19	9,00	9,03	9,01
20 - 24	7,24	7,09	7,17
25 - 29	8,12	8,74	8,42
30 - 34	8,12	8,94	8,52
35 - 39	6,99	7,00	6,99
40 - 44	5,99	6,16	6,07
45 - 49	5,18	4,50	4,85
50 - 54	4,05	3,64	3,85
55 - 59	3,16	2,85	3,01
60 - 64	2,23	1,94	2,09
65 - 69	1,27	1,35	1,31
70 - 74	0,72	0,75	0,73
75 +	0,72	0,76	0,74
Kabupaten Halmahera Tengah	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2017

Aspek lain yang perlu diperhatikan yaitu komposisi penduduk laki-laki dan perempuan. Komposisi penduduk antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari *sex ratio*. Pada tabel 3, *sex ratio* Halmahera Tengah adalah sebesar 105, artinya dari 100 penduduk perempuan ada 105 penduduk laki-laki. Jadi, disini penduduk laki-laki masih lebih banyak dibanding penduduk perempuan.

Tabel 3. *Sex Ratio* dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Halmahera Tengah, 2017

Kabupaten Halmahera Tengah	2017
(1)	(2)
Sex Ratio	105
Kepadatan	23

Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

Halmahera Tengah merupakan kabupaten di Pulau Halmahera dengan luas daratan sekitar 2.276,83 km^2 atau sekitar 27 persen dari luas wilayah keseluruhan. Pada tabel 3, kepadatan penduduk Halmahera Tengah yaitu sebesar 23,19 jiwa/km^2. Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk yang tinggal dalam suatu wilayah per km^2. Sehingga arti dari angka 23 yaitu setiap satu kilometer persegi wilayah daratan Halmahera Tengah dihuni oleh sekitar 23 penduduk.

Angka Beban Ketergantungan

Angka Beban Ketergantungan adalah suatu angka yang menunjukkan besar tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Angka ini merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 0-14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas (non produktif) dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (produktif). Makin besar Angka Beban Ketergantungan maka semakin besar beban tanggungan bagi kelompok usia produktif. Sebaliknya, semakin kecil angka beban ketergantungan akan memberikan

kesempatan bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya karena semakin kecil beban untuk menanggung penduduk usia non produktif.

Gambar 1. Angka Beban Ketergantungan di Kabupaten Halmahera Tengah, 2016 – 2017
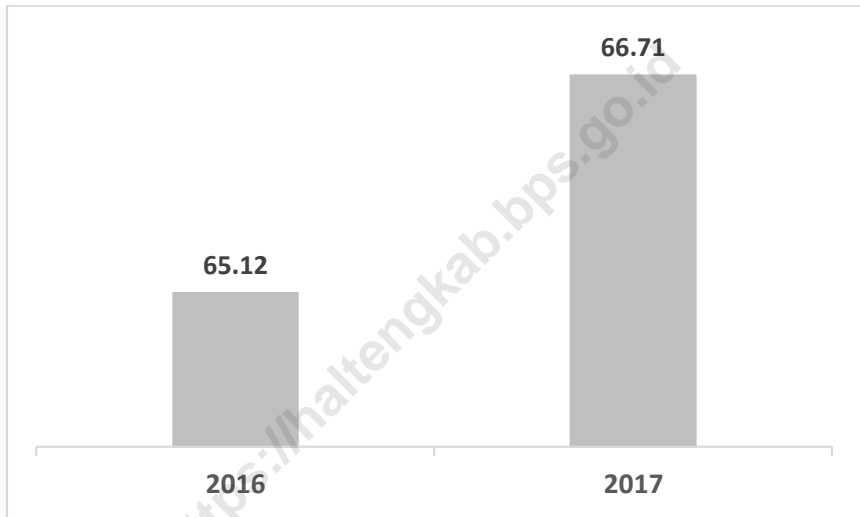
Sumber: BPS, Susenas

Berdasarkan gambar 1, angka beban ketergantungan di Halmahera Tengah pada periode 2016 - 2017 mengalami peningkatan. Hal ini berarti selama periode tersebut capaian keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan bisa dikatakan cenderung menurun. Pada tahun 2017, angka beban ketergantungan berkisar 66,71, berarti setiap 100 penduduk usia produktif secara ekonomi harus menanggung beban sekitar 66 sampai 67 penduduk yang tidak produktif secara ekonomi. Ini mengindikasikan terjadi peningkatan jumlah penduduk non produktif pada tahun 2017.

Pada tabel 4 dapat dilihat proporsi penduduk muda pada tahun 2017 adalah sebesar 37,23 persen dan penduduk usia tua berkisar 2,78 persen. Proporsi penduduk untuk usia produktif (15 – 64 tahun) yaitu

59,99 persen dari total penduduk. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, maka persentase penduduk produktif laki-laki yaitu 60,08 persen lebih besar dibanding persentase penduduk produktif perempuan yaitu 59,89 persen.

Tabel 4. Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur Produktif dan Angka Beban Ketergantungan di Kabupaten Halmahera Tengah, 2017

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
0-14	37,22	37,25	37,23
15-64	60,08	59,89	59,99
65+	2,70	2,86	2,78
Dependency Ratio	66,45	66,98	66,71
Jumlah	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas

Komposisi penduduk seperti di atas mengindikasikan bahwa jumlah penduduk produktif memang memiliki beban yang cenderung kecil untuk menanggung penduduk usia non produktif. Hal ini dikarenakan semakin besar proporsi penduduk produktif maka beban yang ditanggung akan semakin kecil. Namun di sisi yang lain, hal ini juga dapat menjadi masalah tersendiri jika besarnya proporsi penduduk yang produktif tersebut tidak diimbangi oleh lapangan usaha yang tersedia. Banyak penduduk produktif yang tidak mendapat pekerjaan sehingga tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, diperlukan perhatian dari pemerintah dalam mencegah masalah tersebut dengan mempersiapkan lapangan usaha bagi penduduk produktif, ataupun melakukan penyuluhan kepada penduduk dalam rangka meningkatkan kualitas penduduk dalam berwirausaha.

2
PENDIDIKAN
98,10
79,01
64,67
APM
Angka
Partisipasi
Murni
2017
Proporsi anak sekolah pada suatu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut. Sejak tahun 2009, pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C turut diperhitungkan).
Sumber: BPS,Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2017

PENDIDIKAN

Pendidikan memiliki peran penting terhadap kualitas penduduk di suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat pendidikan, menunjukkan semakin tingginya kualitas penduduknya. Di sisi lain, pendidikan juga berpengaruh terhadap kualitas hidup seseorang. Semakin baik pendidikan maka semakin baik kualitas hidupnya. Oleh sebab itu, perlu kesadaran baik bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan maupun penduduk yang merupakan aset pembangunan dalam meningkatkan tingkat pendidikan.

Data-data tentang pendidikan sangat diperlukan dalam menentukan arah program pembangunan di bidang pendidikan sehingga tepat sasaran. Pencapaian program pembangunan pendidikan bisa diukur melalui beberapa indikator. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat hasil pembangunan pendidikan khususnya di Halmahera Tengah antara lain Angka Partisipasi Sekolah dan Angka Partisipasi Murni.

Angka Pertisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Meningkatnya angka partisipasi sekolah berarti menunjukkan adanya keberhasilan upaya meningkatkan akses penduduk terhadap pendidikan. APS dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah terutama Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah berkaitan dengan salah satu target yang ingin dicapai oleh negara-negara berkembang yang tertuang dalam Millenium Development Goals (MDGs) bahwa 100 persen penduduk usia SD dan SMP dapat menyelesaikan pendidikannya pada 2015.

Tabel 5. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Halmahera Tengah, 2016-2017

Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7 – 12 tahun	98,04	97,66	99,50	98,61	98,78	98,10
13 – 15 tahun	100,00	97,92	100,00	97,95	100,00	97,94
16 – 18 tahun	61,14	79,93	71,52	68,89	65,65	74,57

Sumber: BPS, Susenas

Berdasarkan tabel 5, pada 2017 sekitar 98,10 persen penduduk usia 7-12 tahun di Halmahera Tengah aktif mengenyam pendidikan. Angka ini lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu sebesar 98,78 persen. Pada tahun 2016, penduduk usia 13-15 tahun yang aktif mengenyam pendidikan sebesar 100 persen dan turun menjadi 97,94 persen pada tahun 2017. Sedangkan untuk APS penduduk usia 16-18 tahun, meningkat dari 65,65 persen pada tahun 2016 menjadi 74,57. Penurunan APS usia 7 – 12 tahun dan 16 – 18 tahun menunjukkan tingginya penduduk yang tidak melanjutkan sekolahnya. Hal ini perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah karena jika terus dibiarkan akan berdampak buruk bagi kualitas SDM di Halmahera Tengah.

Secara umum, APS laki-laki lebih kecil dibanding perempuan. Hal ini mengindikasikan kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan terutama bagi penduduk laki-laki. Selain itu, sebagian penduduk laki-laki lebih memilih bekerja dibanding harus melanjutkan pendidikannya.

Angka Partisipasi Murni (APM)

APM adalah proporsi jumlah anak pada kelompok usia tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Sebagai gambaran dalam hal ini adalah APM untuk tingkat SD merupakan proporsi jumlah murid SD yang berusia 7-12 tahun terhadap jumlah seluruh anak yang berusia 7- 12 tahun. APM digunakan untuk melihat proporsi penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. APM sebesar 100 persen artinya semua anak usia sekolah bersekolah tepat waktu.

Tabel 6. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Halmahera Tengah, 2016-2017

Jenjang Pendidikan	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD	95,89	97,66	97,88	98,61	96,90	98,10
SMP	80,63	78,83	80,81	79,25	80,73	79,01
SMA	54,56	63,97	71,52	65,40	61,93	64,67

Sumber: BPS, Susenas

Berdasarkan tabel di atas, semakin tinggi jenjang pendidikan maka APM semakin rendah. Ini berarti semakin tinggi jenjang pendidikan semakin banyak penduduk yang tidak sesuai antara umur dan jenjang pendidikannya. Hal ini juga mengindikasikan kesadaran akan pentingnya melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Kondisi ini juga harus menjadi perhatian pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih merata.

3
KESEHATAN DAN GIZI
45,44%
Laki-laki & Perempuan
46,76%
Perempuan
43,81%
Laki-laki
DPT-HB O
Persentase Balita yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap 2017
(BCG, DPT, Polio, Hepatitis B, Campak)
Sumber: BPS,Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2017
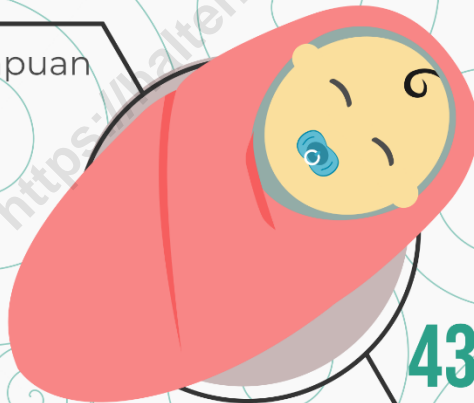
KESEHATAN DAN GIZI

Kondisi kesehatan dan gizi merupakan bagian penting dari kesejahteraan rakyat. Kesehatan dan gizi juga merupakan aspek penting bagi penduduk dalam menunjang aktivitas sehari-hari. Semakin baik kondisi kesehatan dan gizi penduduk dapat meningkatkan kualitas dan potensi ekonomi penduduk. Tidak ada artinya pertumbuhan ekonomi dan pendidikan yang tinggi jika tidak dibarengi dengan kesehatan penduduknya.

Banyak indikator yang dapat digunakan dalam mengukur derajat kesehatan dan gizi penduduk. Namun, indikator yang digunakan yaitu Status Kesehatan Penduduk, Pemberian ASI dan Imunisasi, serta Fasilitas Kesehatan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan data.

Status Kesehatan Penduduk

Gambar 2. Angka Kesakitan Kabupaten Halmahera Tengah, 2016-2017
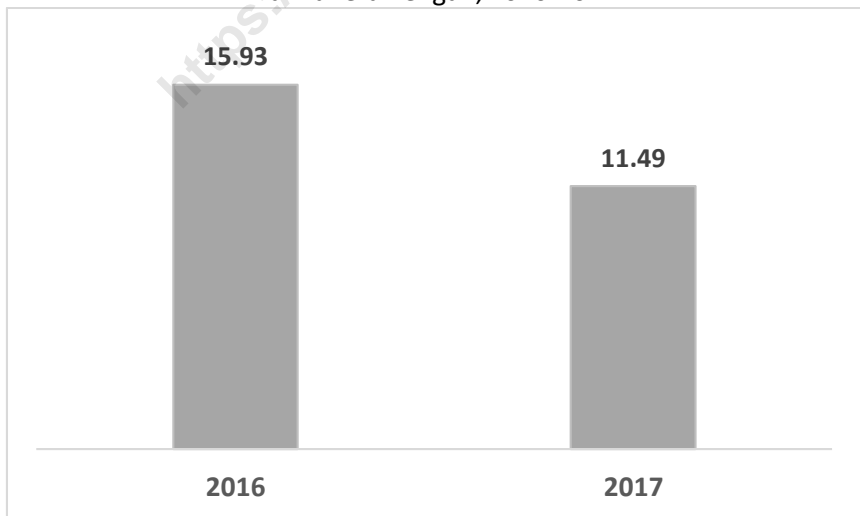
Sumber: BPS, Susenas

Status kesehatan memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan penduduk pada waktu tertentu. Referensi waktu yang digunakan dalam Susenas adalah sebulan yang lalu. Gambar 3 menyajikan angka kesakitan penduduk selama 2016-2017. Pada 2016, angka kesakitan penduduk Halmahera Tengah mencapai 15,93 persen, dan turun menjadi 11,49 persen pada 2017. Ini berarti penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan menyebabkan aktivitasnya terganggu mencapai 11,49 persen pada 2017.

Pemberian ASI dan Imunisasi

ASI merupakan zat makanan yang paling ideal bagi pertumbuhan bayi. ASI mengandung zat gizi yang dibutuhkan bayi dalam jumlah yang cukup, zat pembentukan, dan zat kekebalan tubuh. Oleh karena itu, semakin lama anak disusui akan semakin baik tingkat pertumbuhan dan kesehatannya.

Tabel 7. Rata-rata Lama Pemberian ASI (Bulan) di Kabupaten Halmahera Tengah, 2016 – 2017

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	8,84	9,11	8,98
2017	11,31	8,63	9,93

Sumber: BPS, Susenas

Rata-rata lama pemberian ASI pada balita laki-laki mengalami peningkatan dari 8,84 bulan pada tahun 2016, menjadi 11,31 bulan pada tahun 2017. Sedangkan rata-rata lama pemberian ASI pada balita perempuan mengalami penurunan dari 9,11 bulan pada tahun 2016 menjadi 8,63 pada tahun 2017. Secara umum rata-rata lama pemberian ASI bagi balita di Kabupaten Halmahera Tengah mengalami peningkatan dari 8,98 bulan pada tahun 2016 menjadi 9,93 bulan pada tahun 2017. Namun rata-rata lama pemberian ASI tersebut masih jauh dari harapan.

Berdasarkan anjuran kesehatan, balita seharusnya diberi ASI selama 24 bulan (2 tahun). Oleh karena itu, perlu adanya upaya nyata yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ASI bagi balita dengan harapan setiap balita di Halmahera Tengah bisa mendapatkan ASI sesuai anjuran kesehatan.

Selain kebutuhan ASI, balita juga memerlukan kekebalan buatan yang diperoleh melalui imunisasi karena kekebalan tubuhnya masih sangat rentan. Imunisasi bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan sistem kekebalan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Pada umur satu tahun, bayi semestinya telah diimunisasi secara lengkap, yaitu satu kali BCG dan campak, tiga kali DPT dan polio.

Gambar 3. Persentase Balita yang Mendapat Imunisasi Lengkap Menurut Jenis Kelamin, 2017
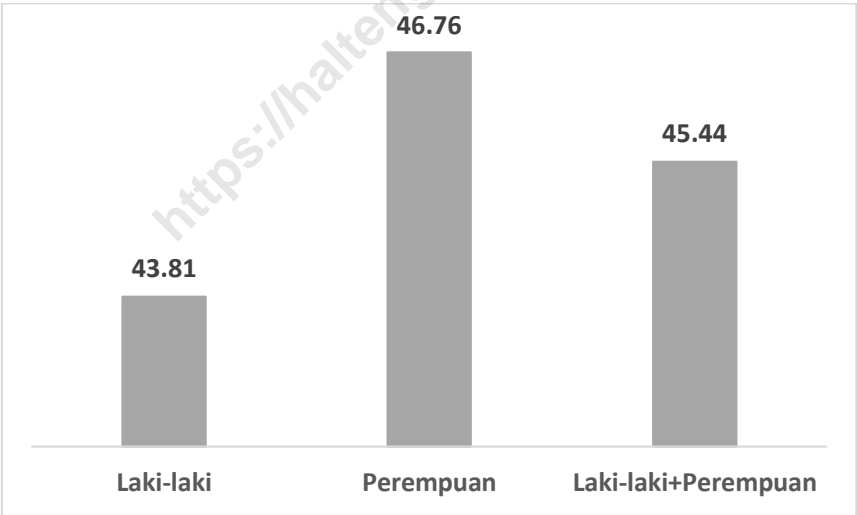
Sumber: BPS, Susenas

Berdasarkan gambar 5, persentase balita yang mendapat imunisasi lengkap hanya 45,44 persen dari seluruh balita di Kabupaten Halmahera Tengah. Hal ini menunjukkan masih sangat kurangnya kesadaran penduduk dalam memberikan imunisasi lengkap kepada balita.

Sedangkan balita laki-laki mendapat imunisasi lengkap yang lebih baik yaitu 43,81 persen, dibanding balita wanita yang hanya 46,76 persen.

Fasilitas Kesehatan

Ketersediaan serta keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan merupakan salah satu faktor penentu terwujudnya peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk. Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Polindes merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan karena dapat menjangkau penduduk sampai di pelosok. Namun ketersediaan dan kualitasnya dirasakan masih sangat kurang dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada saat ini. Pada tabel 9, disajikan perkembangan beberapa fasilitas kesehatan di Halmahera Tengah 2016-2017.

Tabel 8. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Halmahera Tengah, 2016-2017

Tahun	Rumah Sakit	Rumah Bersalin	Puskesmas	Posyandu	Klinik	Polindes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2016	1	0	9	67	0	6
2017	1	0	10	69	0	0

Sumber: Daerah dalam Angka Kabupaten Halmahera Tengah, 2017

Berdasarkan tabel diatas, terdapat penurunan Polindes di Kabupaten Halmahera Tengah menjadi 0 (tidak ada Polindes) pada tahun 2017. Selain itu, terdapat peningkatan jumlah puskesmas pada tahun 2017 menjadi 10 unit. Pada setiap kecamatan sudah memiliki Puskesmas. Selain peningkatan fasilitas kesehatan, yang tidak kalah penting adalah tersedianya tenaga medis khususnya penolong persalinan yang memadai baik jumlah, keahlian, maupun keterjangkauannya. Selain faktor sarana dan prasarana di atas, kemudahan akses transportasi untuk menuju fasilitas kesehatan tersebut sangat diperlukan.

4
PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN
Sumber
Penerangan Utama
Rumah Tangga
2017
75,08%
PLN
13,10%
Non PLN
11,8% Rumah tangga
sumber penerangan utamanya
Bukan Listrik
Sumber: BPS,Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2017
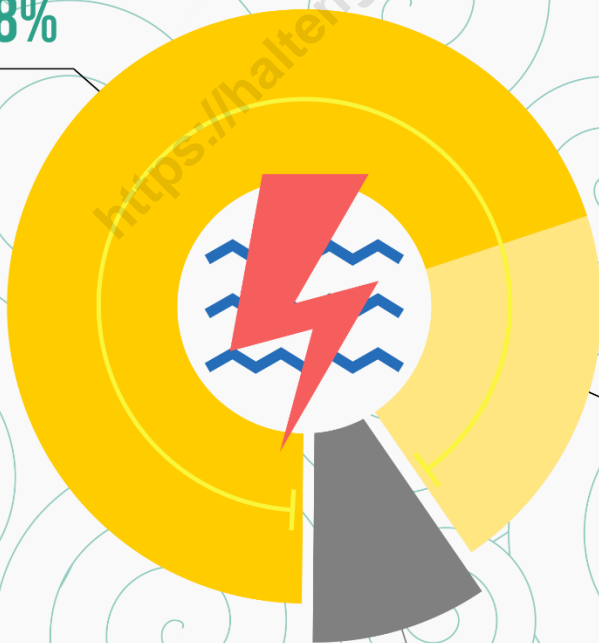
PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Perumahan merupakan kebutuhan primer manusia untuk memiliki tempat tinggal. Selain untuk tempat tinggal dan berlindung, perumahan dan lingkungannya juga dapat menentukan tingkat kesejahteraan penduduk. Tingkat kesejahteraan penduduk ditentukan oleh keadaan fisik rumah yang dapat terlihat dari fasilitas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai fasilitas yang mencerminkan kesejahteraan rumah tangga tersebut dapat dilihat dari jenis lantai terluas, jenis atap, jenis dinding, sumber air minum, dan sanitasi.

Kondisi Perumahan

Tingkat kelayakan kondisi tempat tinggal seseorang dapat dilihat dari kondisi rumah tinggalnya. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kelayakan rumah adalah jenis lantai (bukan tanah). Indikator ini dianggap mempengaruhi keadaan kesehatan anggota rumah tangga yang juga berdampak pada tingkat kesejahteraannya. Secara umum, semakin besar persentase nilai indikator tersebut berarti semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya.

Tabel 9. Indikator Kualitas Perumahan Kabupaten Halmahera Tengah, 2016 - 2017

Indikator Kualitas Perumahan	2016	2017
(1)	(2)	(3)
Lantai Bukan Tanah	90,51	95,12

Sumber : BPS, Susenas

Berdasarkan data Susenas 2017, karakteristik kualitas perumahan di Halmahera Tengah menunjukkan bahwa 95,12 persen lantai perumahan bukan tanah atau 4,88 persen perumahan masih berlantai tanah atau bambu. Rumah tangga dengan jenis lantai tanah menunjukkan tingkat kesejahteraan yang kurang baik dibanding rumah tangga yang berlantai bukan tanah. Lantai tanah juga dapat berpengaruh pada kondisi kesehatan rumah tangga karena lantai tanah menjadi media yang

mudah bagi penularan penyakit tertentu seperti diare, cacingan, dan penyakit kulit. Untuk atap, 97,69 persen perumahan sudah memiliki atap yang layak.

Fasilitas Perumahan

Selain dilihat dari kondisi fisik bangunannya, kualitas perumahan juga ditentukan oleh fasilitas yang ada di dalamnya. Fasilitas perumahan penting untuk membuat suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditempati. Salah satu fasilitas pokok yang penting adalah tersedianya listrik sebagai sumber penerangan utama

Tabel 10. Indikator Fasilitas Perumahan Kabupaten Halmahera Tengah, 2017

Indikator Kualitas Perumahan	2017
(1)	(3)
Listrik	88,18

Sumber : BPS, Susenas

Sumber penerangan utama yang ideal bagi rumah tangga adalah listrik. Listrik dinilai lebih terang, praktis, dan modern serta tidak menimbulkan polusi. Rumah tangga yang menggunakan listrik dianggap mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Pada tahun 2017, penduduk Halmahera Tengah yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utama sebesar 88,18 persen (terdiri dari 75,08 persen penduduk yang menggunakan listrik PLN dan 13,1 persen penduduk menggunakan listrik non PLN) , sedangkan sisanya masih menggunakan lampu minyak dan tidak memasang instalasi listrik di rumahnya. Pasokan listrik di Halmahera Tengah berasal dari PLN, sedangkan khusus di Kecamatan Pulau Gebe, listrik didapat dari aliran listrik perusahaan tambang.

5
KEMISKINAN
Persentase
Penduduk Miskin
16,88%
2014
15,23%
14,03%
14,15%
2017
Sumber: BPS,Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2017
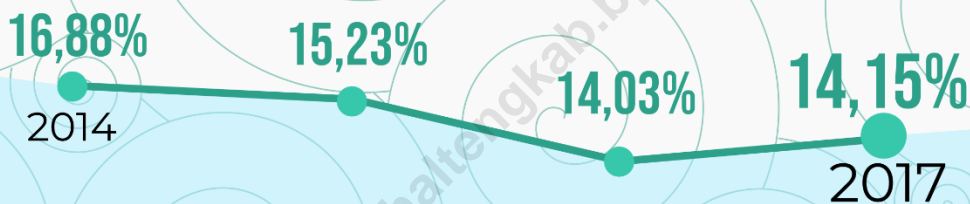
KEMISKINAN

Pada dasarnya, pembangunan bertujuan untuk menciptakan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan. Menurut BPS, kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran. Kemiskinan merupakan masalah yang multidimensional, yaitu tidak hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Dalam analisis kemiskinan dikenal beberapa indikator penting, yaitu persentase penduduk miskin (P_0) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2).

Perkembangan Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kemiskinan yang sebenarnya.

Gambar 4. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Halmahera Tengah, 2013-2017

17.44
16.88
15.23
14.03
14.15
2013
2014
2015
2016
2017
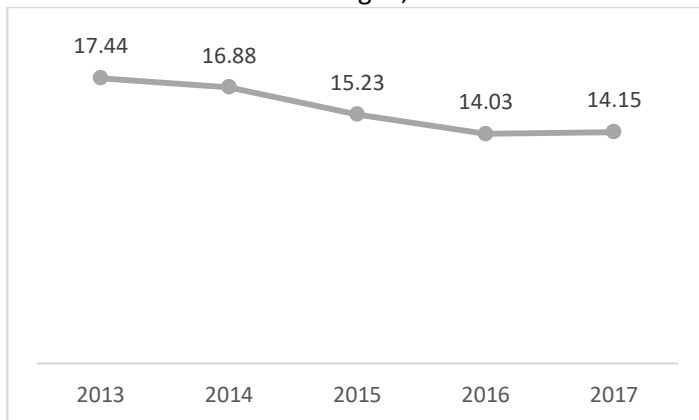
Sumber: BPS, Susenas

Perkembangan persentase kemiskinan Kabupaten Halmahera Tengah beberapa tahun terakhir menunjukkan penurunan. Namun pada tahun 2017 persentase kemiskinan mengalami sedikit peningkatan. Pada tahun 2017, presentase penduduk miskin sebesar 14,15 persen, lebih tnggi dari tahun 2016 yaitu sebesar 14,03 persen. Hal ini selaras dengan melemahnya harga jual kopra dan pala yang menyebabkan petani merugi. Persentase penduduk miskin Halmahera Tengah masih jauh lebih tinggi dibanding presentase penduduk miskin Provinsi Maluku Utara, yaitu sebesar 6,44 persen.

Gambar 5. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Halmahera Tengah, 2013-2017

Sumber: BPS, Susenas

Penanganan masalah kemiskinan tidak hanya dengan mengurangi jumlah dan persentase penduduk miskin, namun juga perlu memperhatikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (Indeks kedalaman kemiskinan). Dari tahun 2008, indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Halmahera Tengah cenderung mengalami penurunan, yaitu 5,58 pada tahun 2008 menjadi 2,01 pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata

pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Tengah semakin mendekati garis kemiskinan. Artinya ada perbaikan secara rata-rata pada standar hidup penduduk miskin mendekati garis kemiskinan.

Selanjutnya, untuk analisis yang lebih mendalam dibutuhkan indikator lain untuk mengukur distribusi pendapatan di antara penduduk miskin, yaitu Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2). Berdasarkan gambar 8, Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di Kabupaten Halmahera Tengah juga cenderung mengalami penurunan dari tahun 2008 yaitu sebesar 1,54 menjadi 0,46 pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin Kabupaten Halmahera Tengah semakin berkurang.

Gambar 6. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Halmahera Tengah, 2013-2017
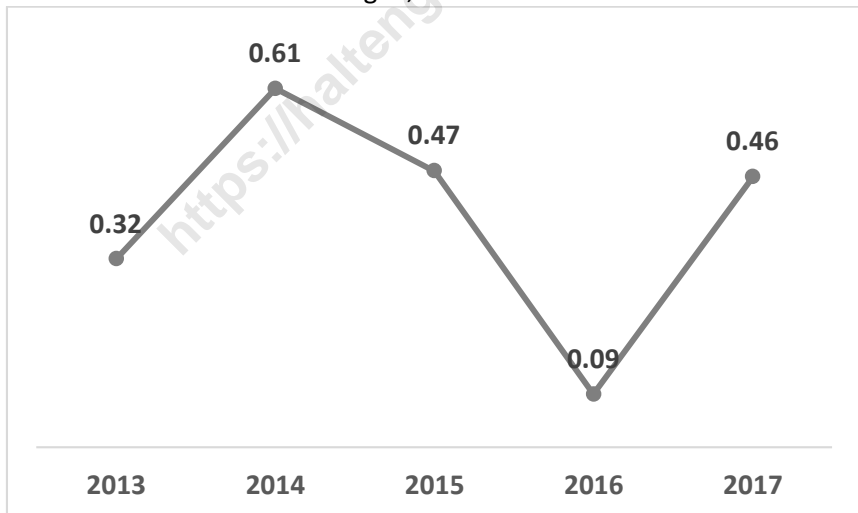
Sumber: BPS, Susenas

6
SOSIAL LAINNYA
Penduduk yang
Memiliki HP
43,58%
Penduduk yang
Menggunakan Komputer
9,61%
Penduduk yang
Mengakses Internet
2017
10,98%
Google
Sumber: BPS,Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2017
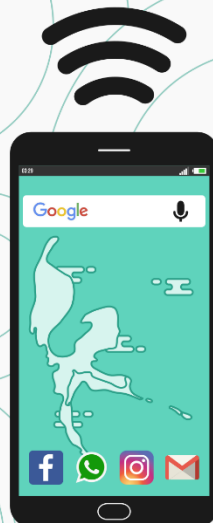
SOSIAL LAINNYA

Akses pada Teknologi Komunikasi dan Informasi

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut masyarakat untuk semakin melek teknologi. Salah satu indikator untuk mengukurnya yaitu dengan melihat seberapa banyak penduduk yang memiliki telepon seluler, menggunakan komputer, dan mengakses internet. Semakin banyak masyarakat yang memiliki telepon seluler, menggunakan computer, dan mengakses internet menunjukkan masyarakat yang semakin melek teknologi komunikasi dan informasi.

Tabel 11. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik dan Penggunaan Teknologi Informasi, 2016-2017

Tahun	Memiliki Telepon Seluler (HP)/Nirkabel	Menggunakan Komputer (PC/Desktop, Laptop/Notebook, Tablet)	Mengakses Internet (Termasuk Facebook,Twitter, BBM,Whatsapp)
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	40,94	6,89	7,51
2017	43,58	9,61	10,98

Sumber: BPS, Susenas

Pada tahun 2017 terjadi peningkatan persentase penduduk yang mengakses internet dari 7,51 persen pada 2016 menjadi 10,98 persen. Persentase penduduk yang memiliki telepon seluler (HP)/Nirkabel juga mengalami peningkatan dari 40,94 persen pada tahun 2016 menjadi 43,58 persen pada tahun 2017. Selain itu, persentasi penggunaan komputer juga mengalami peningkatan dari 6,89 persen pda tahun 2016 menjadi 9,61 pada tahun 2017. Peningkatan ini menunjukkan juga meningkatnya kesadaran penduduk Halmahera Tengah pada teknologi komunikasi dan informasi.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
JL. Poros Weda Payahe
Email : bps8202@mailhost.bps.go.id
Homepage : haltengkab.bps.go.id

ISBN 978-602-662-130-6